



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 110 TELP. (031) 3524001 – 3524011

SURABAYA

Surabaya, 15 Oktober 2024

Nomor : 900.1.1/11778 /203.6/2024
Sifat : SEGERA
Lampiran : 38 (tiga puluh delapan) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Penilaian Keselarasan
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
Kabupaten/Kota dengan KEM PPKF
Tahun 2025

Kepada.

Yth. Sdr. Bupati/Walikota
Se-Jawa Timur
di

TEMPAT

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional khususnya terkait penyelarasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF untuk Kabupaten/Kota, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional bahwa Bupati/Walikota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
2. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dijelaskan bahwa atas rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota dilakukan penilaian keselarasan dengan KEM PPKF oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan koordinasi Gubernur dengan Menteri Keuangan, dilakukan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai perwakilan dari Menteri Keuangan di daerah.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, penilaian keselarasan antara rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF dilaksanakan mulai tahun 2024.
4. Untuk melaksanakan penilaian keselarasan tersebut, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah menyiapkan mekanisme penilaian keselarasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF melalui otomatisasi SIKD *Next Generation*. Namun demikian, sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-48/PK/PK.6/2024 tanggal 26 Juli 2024 terkait Penilaian

Keselaran Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan KEM PPF Tahun 2025, hal tersebut belum dapat digunakan sepenuhnya dikarenakan masih terkendalanya aliran data dari SIPD ke SIKD. Oleh karena itu, pelaksanaan penilaian keselaran rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas kerja untuk tiga indikator yang ada di KEM PPKF tahun 2025 yakni Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan *Wellbeing* (Stunting) dan Penguatan *Wellbeing* (Kemiskinan).

5. Hasil penilaian keselaran rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota dengan KEM PPKF (terlampir). Selanjutnya Kepala Daerah (Bupati/Walikota) melakukan penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan PPAS bersama DPRD. Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah mendapatkan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD maka hasil penilaian keselaran rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota dengan KEM PPKF Tahun 2025 akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Gubernur Jawa Timur

Pj. Sekretaris Daerah



Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661031/199011 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

DAFTAR LAMPIRAN

KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DILAKUKAN PENILIAN KESELARASAN RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS DENGAN KEM PPKF TAHUN 2025

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Kabupaten Pasuruan | 20. Kabupaten Bangkalan |
| 2. Kabupaten Magetan | 21. Kabupaten Bojonegoro |
| 3. Kabupaten Malang | 22. Kabupaten Trenggalek |
| 4. Kabupaten Nganjuk | 23. Kota Surabaya |
| 5. Kabupaten Kediri | 24. Kota Malang |
| 6. Kabupaten Blitar | 25. Kabupaten Banyuwangi |
| 7. Kabupaten Sidoarjo | 26. Kabupaten Jember |
| 8. Kabupaten Sampang | 27. Kabupaten Situbondo |
| 9. Kabupaten Probolinggo | 28. Kabupaten Sumenep |
| 10. Kabupaten Jombang | 29. Kabupaten Lumajang |
| 11. Kota Madiun | 30. Kabupaten Mojokerto |
| 12. Kabupaten Pacitan | 31. Kabupaten Gresik |
| 13. Kabupaten Tulungagung | 32. Kota Probolinggo |
| 14. Kota Kediri | 33. Kabupaten Madiun |
| 15. Kabupaten Ponorogo | 34. Kota Blitar |
| 16. Kabupaten Tuban | 35. Kota Mojokerto |
| 17. Kota Pasuruan | 36. Kabupaten Pamekasan |
| 18. Kabupaten Ngawi | 37. Kota Batu |
| 19. Kabupaten Bondowoso | 38. Kabupaten Lamongan |